

ANALISIS PENGARUH PENGENDALIAN AKUNTANSI, SISTEM PELAPORAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Widaryanti *)

Nurul Latifah Pancawardani *)

Abstract

This study aims to determine the Accounting Control, Reporting System, and Clarity of the Targeted Budget for the Accountability of Government Institutions Performance. Methods of collecting data through a questionnaire given directly to the Head of Finance and Finance staff in all Regional Work Units (SKPD) in the City of Semarang. The test technique used is the validity test, reliability test, classic assumption test includes normality test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test. Hypothesis testing in this study uses multiple linear regression analysis using Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 17 software. The results of empirical studies show that Partially Accounting Control has no effect on the Accountability of Government Agency Performance, Reporting Systems have a positive effect on Accountability of Government Agency Performance, and Clarity of Budget Targets have an effect on Accountability of Government Institutional Performance, While Simultaneously Accounting Control, Reporting System, and Clarity of Target The budget affects the Performance Accountability of Government Agencies.

Keywords : Performance accountability of public institutions, Accounting Control, Reporting Systems, Budget Goals Clarity

Pendahuluan

Perpindahan sistem pemerintahan Republik Indonesia dari arah sentralisasi kearah sistem pemerintahan yang desentralisasi dalam wujud otonomi daerah yang sampai saat ini masih berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah

*) *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara Semarang*

pusat dan daerah mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal yaitu anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan (Wulandari, 2009).

Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah. Pengelolaan anggaran pemerintah daerah merupakan wujud dari pemerintah daerah. Pengelolaan anggaran pemerintah daerah merupakan wujud dari pemerintah yang memiliki akuntabilitas. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa agar dapat mencapai akuntabilitas publik dapat dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata.

Di Indonesia pengukuran kinerja dilakukan untuk menanggapi TAP MPR No. 9/MPR/th.1998 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan UU No. 28 tahun 1999 tentang hal yang sama. Menanggapi peraturan tersebut maka dikeluarkan Inpres No 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah menyusun perencanaan strategik, melakukan pengukuran kinerja dan melaporkannya sebagai wujud akuntabilitas (Nasir, 2011).

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang telah mereka lakukan kepada pihak pemberi amanah (principal) yang berhak untuk meminta pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2009). Oleh karena itu baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus bias menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, tepat waktu, relevan, dapat dipercaya, dan konsisten. Semakin cepatt dan akurat informasi yang diberikan oleh instansi pemerintah akan memberikan dampak positif bagi instansi. Contohnya seperti Pemerintah Kota Semarang dimana SKPD Kota Semarang lebih mengutamakan transparansi dan akuntabilitas saat menggunakan dan mnyusun laporan keuangan. Hal ini menjadikan Pemerintah Kota Semarang kembali mempertahankan penilaian tertinggi atas laporan keuangan daerah pada 2020 dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk empat tahun berturut-turut.

BPK memberikan Opini Wajar Pengecualian (WTP) kepada pemerintah kota semarang pada tanggal 20 Mei 2020. Meskipun memperoleh opini tertiggi, namun sejumlah permasalahan keuangan untuk tahun anggaran 2019 sempat menjadi temuan dari BPK dan berpotensi merugikan keuangan daerah. Untuk mencegah potensipotensi buruk terjadi ,

pihak intansi perlu menyadari bahwa ada ancaman dari berbagai sumber seperti lingkungan internal. Contoh dari lingkungan internal adalah Kejelasan Sasaran Anggaran, pengendalian Akuntansi, dan sistem Pelaporan.

Prestasi yang diperoleh pemerintah Kota Semarang berupa pemberian opini WTP empat kali berturut-turut oleh BPK inilah yang membuat tertarik untuk mengetahui apakah Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan kejelasan Sasaran Anggaran berperan penting dan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Semarang Sehingga meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian empat kali berturut-turut. Apabila berpengaruh positif terhadap akuntabilitas, pastinya akan dijadikan percontohan bagi daerah lain agar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi lebih baik.

Dengan adanya pengendalian akuntansi maka instansi pemerintah dapat mengontrol dan menilai seluruh aktivitas dan tanggung jawab yang dilakukan instansi tersebut. Pengendalian akuntansi dapat menilai apakah kegiatan yang dilaksanakan pemerintah tersebut telah ekonomis, efisien, dan efektivitas pelayanan dari instansi pemerintah daerah kepada masyarakat, ini merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah daerah. Tercapainya indikator tersebut merupakan suatu prestasi yang dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Maka semakin tinggi pengendalian akuntansi yang diterapkan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah semakin meningkat (Pratama et.al, 2019).

Hal lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sistem pelaporan. Hidayattullah (2013) menjelaskan bahwa sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). LAN dan BPKP mengemukakan, laporan yang baik adalah laporan yang disusun secara jujur, objektif dan transparan. Sistem pelaporan yang baik sangat diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang disajikan secara akurat, relevan, konsisten, dan dapat dipercaya.

Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat. Herawaty (2011) menyatakan dalam menghadapi akuntabilitas tersebut, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal antara lain anggaran,

pengendalian akuntansi, efektivitas pelaksanaan anggaran dan sistem pelaporan. Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah sasaran kinerja yang jelas

Faktor-faktor yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya telah diteliti dalam beberapa penelitian antara lain penelitian yang dilakukan oleh Pratama et.al (2019), Cahyani dan Utama (2015) yang menyimpulkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Herawaty (2011), dan Anjarwati (2012) hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Pengendalian Akuntansi berpengaruh negatif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penelitian yang dilakukan Pratama et.al (2019), Anjarwati (2012), Yulianti (2014) menyimpulkan bahwa Sistem Pelaporan Berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2014) menunjukkan bahwa Sistem Pelaporan berpengaruh negatif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dan Utama (2015), Setiawan (2014), dan Anjarwati Menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pratama et.al (2019) dan Herawaty (2011) yang menyimpulkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Objek penelitian ini di SKPD Kota Semarang karena laporan keuangan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan disusun berdasarkan laporan keuangan dari masing-masing SKPD sebagai entitas akuntansi yang dikonsolidasikan, selain itu adanya perbedaan kebijakan yang ada pada daerah satu dengan daerah yang lain, sehingga pengendalian, sasaran anggaran dan tingkat akuntabilitas suatu daerah juga berbeda, kondisi tersebut yang mungkin terjadi di Kota Semarang, perbedaan periode penelitian yang dilakukan sehingga kebijakan-kebijakan yang diambilkan berbeda pada periode sebelumnya, antara lain mengenai kebijakan anggaran dan pengendaliannya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Semarang).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik secara parsial maupun secara simultan.

Kajian Pustaka

Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan suatu instansi pemerintah agar dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan sejak awal melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Inpres No. 7/1999). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diukur dengan menggunakan instrument yang dikembangkan oleh Chairunnisa (2013). Pertanyaan ini diukur dengan menggunakan tujuh indikator variabel, yaitu: 1. Perumusan visi, misi, factor kunci keberhasilan, tujuan sasaran dan strategi pemerintah, 2. Perumusan indikator kinerja yang terdiri dari masukan (input), Proses (process), keluaran (outputs), manfaat (benefit), dan dampak (impacts), 3. Ada tidaknya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah yang bersangkutan, 4. Ada sistem yang mampu menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan, 5. Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, 6. Jujur, obyektif, transparan dan inovatif, 7. Evaluasi kinerja program/kegiatan.

Pengendalian Akuntansi

Pengendalian Akuntansi merupakan suatu sistem pengendalian formal, berbasis akuntansi yang digunakan oleh organisasi untuk melakukan aktivitas yang bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ekonomis, efisien, dan efektif (Mardiasmo, 2012). Variabel pengendalian akuntansi diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Anthony (2000). Pernyataan ini diukur dengan menggunakan empat indikator variabel, yaitu: 1. Pemisahan fungsi, 2. Prosedur pemberian wewenang, 3. Prosedur dokumentasi, 4. Prosedur dan catatan akuntansi

Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan

anggaran yang telah ditetapkan (Wahyuni, 2014). Variabel sistem pelaporan diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Anjarwati (2012). Pernyataan ini diukur dengan menggunakan lima indikator variabel, yaitu: 1. Penyajian laporan keuangan secara lengkap, 2. Informasi dalam laporan keuangan digunakan sebagai alat koreksi, 3. Informasi keuangan disajikan untuk memenuhi kebutuhan umum bukan kebutuhan khusus, 4. Laporan keuangan dapat diuji, 5. Informasi keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran yang telah ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Anjarwati, 2012). Variabel kejelasan sasaran anggaran diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh chairunnisa (2013). Pernyataan ini diukur dengan menggunakan sebelas indikator variabel, yaitu: 1. Anggaran memberikan informasi yang cukup dan jelas atas sasaran yang harus dicapai, 2. Sasaran yang harus dicapai ditetapkan secara periodic, 3. Diperlukan keahlian dan keterampilan yang tinggi untuk mencapai sasaran anggaran selain pendidikan, 4. Sasaran yang ditetapkan dengan jelas dan terperinci dapat menjadi penumbuh motivasi kerja, dan kepuasan kerja, 5. Anggaran dibuat lebih spesifik, 6. Anggaran tahunan dirinci untuk jangka waktu semesteran, triwulan, dan bulanan, 7. Anggaran yang tidak jelas tujuannya/membingungkan akan membuat frustrasi, terjadinya penyimpangan–penyimpangan dan menurunkan kinerja, 8. Tingkat kejelasan sasaran anggaran membentuk pengendalian untuk mencapai tujuan yang direncanakan, 9. Mengetahui pertanggungjawaban dari setiap sasaran anggaran, 10. Mengetahui jumlah input yang harus dicapai dari setiap sasaran, 11. Mengetahui jumlah output yang harus dicapai dari setiap anggaran.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengendalian diperlukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan oleh orang-orang tertentu. Penggunaan pengendalian akuntansi memungkinkan para manajer dapat membuat keputusan-keputusan yang lebih baik, mengontrol operasi-operasi dengan lebih efektif, mampu mengestimasi biaya dan profitabilitas keberhasilan tertentudan memilih alternatif terbaik dalam setiap kasus dan

masalah sehingga dapat meningkatkan kinerja. Pengendalian akuntansi diperlukan karena untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan oleh orang-orang tertentu. Adanya pengendalian akuntansi maka instansi pemerintah dapat mengontrol dan mengevaluasi seluruh aktivitas dan tanggung jawab yang dilakukan. Pengendalian akuntansi dapat menilai apakah kegiatan yang dilaksanakan pemerintah tersebut telah ekonomis, efisien, dan efektifitas pelayanan dari instansi pemerintah daerah kepada masyarakat.

H1 : Pengendalian Akuntansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan system pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja untuk menerapkan anggaran yang sudah ada. Laporan baik (feedback) diperlukan untuk mengukur aktifitas-aktifitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang diterapkan.

H2 : Sistem Pelaporan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan memudahkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Oleh sebab itu kejelasan anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk menyusun dan

melaksanakan kegiatan anggaran. Dengan demikian akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah semakin meningkat.

H2 : Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Metode Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD yang ada pada Pemerintah Kota Semarang. Sampel yang digunakan sebanyak 50 SKPD. Setiap SKPD yang menjadi sampel penelitian dibagikan dua buah kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada kepala bagian keuangan dan staff bagian keuangan yang terlibat langsung dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran di masing-masing. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer berupa persepsi para responden terhadap variabel-variabel yang digunakan. Metode komunikasi untuk memperoleh data dari responden dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara menyebar langsung kuesioner pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kuesioner berisi tentang pernyataan yang harus diisi oleh responden yang menggunakan lima Skala Likert, sebagai berikut: 1= Sangat Tidak Setuju, 2= Tidak Setuju, 3= Netral, 4= Setuju, 5= Sangat Setuju.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Uji Kualitas Data

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa variabel Pengendalian Akuntansi mempunyai kisaran korelasi antara 0,673 sampai dengan 0,808 dan signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa pernyataan – pernyataan untuk mengukur Pengendalian Akuntansi dikatakan Valid. Kemudian variabel Sistem Pelaporan berada pada kisaran korelasi 0,564 sampai dengan 0,768 dan signifikansi pada tingkat 0,000 menunjukkan masing-masing pertanyaan dikatakan valid. Demikian juga variabel Kejelasan Sasaran Anggaran mempunyai korelasi antara 0,452 sampai dengan 0,781 dan signifikansi pada tingkat 0,000 sampai dengan 0,003 menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut dikatakan valid. Kemudian variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berada pada kisaran 0,674 sampai dengan 0,808 dan signifikansi pada tingkat 0,000 menunjukkan masing-masing pernyataan dikatakan valid.

Variabel Pengendalian Akuntansi mempunyai nilai Cronbach's Alpha 0,803, dengan demikian pernyataan-pernyataan tentang Pengendalian Akuntansi sebanyak 4 item adalah reliabel. Variabel Sistem Pelaporan mempunyai nilai Cronbach's Alpha 0,752, dengan demikian pernyataan-pernyataan tentang Sistem Pelaporan sebanyak 5 item adalah reliabel. Kemudian variabel Kejelasan Sasaran Anggaran mempunyai nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,753, dengan demikian pernyataan-pernyataan tentang Kejelasan Sasaran Anggaran sebanyak 11 item adalah reliabel. Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai nilai Cronbach's Alpha 0,782, dengan demikian pernyataan-pernyataan tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebanyak 7 item adalah reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Table 1. Hasil Normalitas Data

One –Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandarized Residual
N		40
Normal Parameters	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,82311131
Most Extreme Difference	Absolute	,133
	Positive	,133
	Negative	-,082
Kolmogorov-Smirnov Z		,844
Asymp. Sig. (2-tailed)		,475

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat nilai K-S (Kolmogorof-Smirnov) adalah 0,844 dan signifikansi pada tingkat 0,475. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal karena nilai signifikansi sebesar $0,475 > 0,05$.

Tabel 2. Hasil uji multikolinieritas

Coefficient ^a		
Model	Colinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pengendalian Akuntansi	0,800	1,250
Sistem Pengendalian	0,475	2,106
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,422	2,368

a. Dependent Variabel: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Berdasarkan pada tabel 2 menunjukkan bahwa data penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi yang kuat antar antar variabel bebas, hal ini dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Variabel Pengendalian Akuntansi memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,800 dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) sebesar 1,250. Variabel Sistem Pelaporan memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,475 dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) sebesar 2,106. Kemudian Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,422 dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) sebesar 2,368. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas, karena untuk semua variabel nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) < 10.

Tabel 3. Hasil uji glejser

Coefficient ^a	
Variabel	Signifikansi
Pengendalian Akuntansi	0,717
Sistem Pelaporan	0,172
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,515

a. Dependent Variabel: Abs_RES

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Hasil dari uji glejser pada table 3 menunjukkan bahwa probabilitas untuk variabel Pengendalian Akuntansi memiliki signifikansi 0,717, variabel sistem pelaporan memiliki tingkat signifikansi 0,172 dan variabel Kejelasan sasaran anggaran memiliki tingkat signifikansi 0,515. Maka dapat disimpulkan dari penelitian bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas dikarenakan semua variabel independen tingkat signifikansinya > 0,05.

Tabel 4. Hasil Regresi Berganda

Coefficient ^a					
Model	Unstandarized Coefficient		Standarized Coefficient	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,704	4,412		,840	,407
Pengendalian Akuntansi	,057	,221	,032	,258	,798
Sistem Pelaporan	,548	,227	,391	2,411	,021
Kejelasan Sasaran Anggaran	,302	,133	,392	2,281	,029

a. Dependent Variabel: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Rumus regresi yang dihasilkan dari uji regresi adalah $AKIP = 3,704 + 0,057PA + 0,548SP + 0,302KSA + e$

Berdasarkan table 4, variabel pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan tingkat signifikansi $0,798 > 0,05$, sedangkan t hitung $0,258 < t$ tabel $2,02809$. Maka dapat disimpulkan H1 ditolak. Hasil uji t statistik pada variabel Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan tingkat signifikansi $0,021 < 0,05$, sedangkan t hitung $2,411 > t$ tabel $2,02809$. Maka dapat disimpulkan H2 diterima. Hasil uji t statistik pada variabel Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan tingkat signifikansi $0,029 < 0,05$ sedangkan t hitung $2,281 > t$ tabel $2,02809$. Maka dapat disimpulkan H3 diterima.

Tabel 5. Hasil uji F

ANOVA						
Model	Sun of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	158,374	3	52,791	14,661	,000 ^a
	Residual	129,626	36	3,601		
	Total	288,000	39			

a. Predictors: (Constant), Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan

b. Dependent Variabel: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 5 dengan nilai F hitung sebesar 14,661 dengan signifikansi pada tingkat 0,000. Hal ini dapat dijelaskan dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha=0,05$) dan F hitung $14,661 > F$ tabel 2,87 dapat diartikan bahwa Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan Kejelasan Sasaran Anggaran secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 6. Koefisien determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the estimate
1	,742 ^a	,550	,512	1,898

a. Predictors: (Constant), Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

Berdasarkan hasil dari tabel 6 dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,512. Hal ini berarti 51,2 persen variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen yaitu Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan Kejelasan Sasaran Anggaran, Sedangkan 48,8 persen dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak ada pada penelitian ini.

Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang berarti Hipotesis pertama ditolak. Hasil ini mengindikasikan bahwa penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tidak tergantung pada Pengendalian Akuntansi, hal tersebut dikarenakan masih adanya kelemahan dalam pengendalian internal yaitu dalam menjaga aktiva dan menjamin akurasi dan daya andal dalam catatan keuangan, dilihat dari opini dari BPK tahun 2019 yang menyatakan masih menemukan beberapa kelemahan dalam sistem pengendalian internal.

Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang berarti hipotesis kedua diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya penyusunan sistem pelaporan yang baik akan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Semarang, hal itu disebabkan karena dengan adanya sistem pelaporan yang baik akan menciptakan pengelolaan yang transparan dan akuntabel sehingga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin baik. Sehingga untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perlu dilakukan pelaporan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan terkait dengan pelaporan anggaran. dengan adanya sistem pelaporan yang baik akan menciptakan pengelolaan yang transparan dan akuntabel sehingga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin baik. Sehingga untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perlu dilakukan pelaporan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan terkait dengan pelaporan anggaran.

Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang berarti hipotesis ketiga diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan sasaran anggaran yang jelas akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, hal tersebut dikarenakan Kejelasan sasaran anggaran dapat membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran yang jelas, tingkat kinerja akan tercapai.

Pencapaian kinerja ini akan terkait dengan motivasi, dimana hal ini disebabkan dengan motivasi yang tinggi akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sasaran anggaran yang tidak jelas akan menimbulkan ketidakpastian atau keragu-raguan para pelaksana yang

mengakibatkan penurunan kinerja dan berarti bahwa kinerja instansi pemerintah akan menurun.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Akuntansi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Pelaporan berpengaruh dan Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan Kejelasan Sasaran Anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Saran bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Semarang, diharapkan dapat meningkatkan Sistem Pelaporan, dan ketepatan dalam menentukan Sasaran Anggaran, agar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah semakin meningkat. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan pengujian parsial menunjukkan bahwa Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian yang akan datang disarankan menambah variabel penelitian yang berpengaruh lebih kuat terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang belum ada dalam penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan Pengujian Koefisien Determinasi seluruh variabel independent memberikan kontribusi sebesar 51,2% terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Semarang, sedangkan 48,8% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Anjarwati, Mei. 2012. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah." *Accounting Analysis Journal* 3 (1): 1–7. doi:ISSN 2252-6765
- Anthony, R.N., Dearden, dan Bedford. (2000). *Sistem Pengendalian Manajemen Edisi V*. Jakarta: Erlangga.
- Auditya, L. dan Husaini, L. (2013). *Analisis Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Jurnal Fairness*, 3(1), 21-41.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*. Third ed. Jakarta: Erlangga.

- Cahyani, Ni Made Mega, and I Made Karya Utama. 2015. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 10 (3): 825–840.
- Chairunnisa, Sephi dan Darwanis. 2013. "Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah". *Jurnal Telaah Dan Riset Auntansi*. Vol. 6. No. 2 Juli 2013
- Chintya. 2015. *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Kota Solok*. Artikel. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Fitriana, R. D., Hidayati, N., & Mawardi, M. C. (2018). Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 7(02).
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM dan SPSS. In aplikasi analisis multivariate dengan program ibm spss 19 (p. 113).
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
- Herawaty, N. 2011. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi*. *Simposium Nasional Akuntansi Vol.13.Jambi*.
- Hidayatullah, A. dan Herdjiono, I. (2013). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD Di Merauke*. *Prosiding*. Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank.
- Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- Kholis, Bayu Nur. 2007. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah." Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Kusumaningrum, Indraswari. 2010. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*. Tesis. Semarang: Fakultas Ekonomi UNDIP.
- LAN dan BPKP. (2013). *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: LAN dan BPKP.
- Lembaga Administrasi Negara. 2003. *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Mardiasmo, (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Mudrajat, K. (2013). *Manajemen Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*.

- Mulyadi, A. R., Syamsidar, S., & Efendy, D. (2018). Pengaruh Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh). *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan*, 2(2), 95-101.
- Mulyadi. 2008. Sistem Akuntansi. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Munandar, M. 2001. *Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta
- Nasir, A. dan Oktari, R. (2011). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kampar*. *Jurnal Ekonomi*. Universitas Riau, 19(02).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pramitha, I. A. M. D. dan Gayatri. (2016). Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik dan Sistem Pelaporan pada Akuntabilitas Kinerja. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3).
- Pratama Rio, Henri Agustin, Salma Taqwa. 2019. "Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*: ISSN 2656-3649
- Setiawan, E. (2014). *Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Sugiyono, Prof Dr. "Metode Penelitian Pendidikan." Pendekatan Kuantitatif (2010)
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suhartono, E. dan Solichin, M. (2006). "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi". *Simposium Nasional Akuntansi 9*. Padang, 23-26 Agustus 2006.
- Suhartono, Ehrmann dan Solichin, Mochammad, (2011). "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi". SNA 9 Padang.
- Susilowati, H. (2014). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Dan Motivasi Kerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pemerintah Kota Surakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- TAP MPR No. IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Undang Undang RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Undang RI No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Undang Undang RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Wahyu Retnaningtyas, T. (2016). *Analisis Akuntabilitas Kinerja Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Wahyuni. 2014. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu)”. Skripsi. Universitas Riau, Pekanbaru

Wulandari, Risma Putri. 2009. “Pengaruh Kejelasan Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.” Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Yulianti, R., Hardi, H., & Rusli, R. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kesulitan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan)* (Doctoral dissertation, Riau University).